

PENGARUH PENERAPAN KEBIJAKAN TKDN (TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI) TERHADAP DAYA SAING PRODUK KERAMIK

**Acep Hasan Zakaria, Firman Firdaus, Kevin Febriansyah Arifin, Ma'sum Munawar,
Ahmad Gunawan**
Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Pelita Bangsa
Email : daus040996@gmail.com

Intisari

Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah tingkat keseluruhan kandungan komponen produksi yang berasal dari dalam negeri berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya. Terdapat beberapa perhitungan dalam TKDN diantaranya: biaya transportasi, biaya tenaga kerja, mesin produksi (jika ada) dan biaya lainnya yang terkait dengan produksi barang dan jasa dimaksud. Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan TKDN yang dimaksudkan untuk meningkatkan utilisasi, efisiensi, daya saing, mutu produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode literatur review. Yaitu mencari referensi yang telah diterbitkan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu : Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Lokal. Sedangkan sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder pada halaman web Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) milik Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pada jumlah produksi dan jumlah sales order meskipun tidak signifikan. Hal ini dapat menunjukan bahwa adanya pengaruh dari penerapan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap daya saing perusahaan juga mampu mensubstitusi produk impor.

Kata Kunci: TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), Keramik,

Abstract

The role of the government in boosting the progress of the manufacturing industry in Indonesia is increasingly visible, this can be proven in the effort to encourage the domestic industry to increase the competitiveness of local products as well as spending on government projects to choose goods and services that already have a domestic component level value 25 %. The government is also trying to encourage the improvement of the industry's ability to produce quality products or components. This has prompted us to research the extent to which domestic companies have increased the use of domestic components to produce their products as well as to what extent are the competitiveness of certified companies.

Keywords: TKDN (Domestic Component Level), Ceramics

PENDAHULUAN

Dalam usaha untuk mendorong industri dalam negeri pemerintah harus dapat meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Semua pihak harus mendukung hal tersebut termasuk perangkat hukum yang bersifat wajib. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan dan mewajibkan penggunaan produk dalam negeri yang harus digunakan oleh: Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang memiliki atau yang menggunakan sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD termasuk pinjaman atau hibah

dari dalam negeri / luar negeri BUMN, BUMD, Swasta yang sumber pembiayaan berasal dari APBN, APBD dan/atau melalui bentuk kerjasama antara Pemerintah dengan swasta dan/atau mengupayakan sumber daya yang dikuasai negara.

Pemerintah mengharapkan proyek-proyek yang dilaksanakan dalam Pengadaan Barang/Jasa, banyak menggunakan bahan dan/atau jasa yang berasal dari dalam negeri. Untuk hal ini, pemerintah mensyaratkan penilaian penawaran peserta pengadaan barang/jasa bukan hanya dari segi teknis atau harga, tetapi harus dilihat juga dari nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terkandung dalam produk barang atau jasa yang disediakan para peserta tender.

Reza Munawir (2021) menyatakan bahwa Penerapan program P3DN dinilai dapat memberikan ruang bagi produsen lokal dalam meningkatkan kapasitas produksi juga mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing dipasar internasional. Sedangkan untuk mensubsitisi produk impor dalam pasar domestik P3DN juga menjadi proteksi lebih terhadap adanya potensi melemahnya nilai tukar. untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018, Presiden RI telah membuat tim khusus yang dinamai dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, yang kemudian disebut Tim Nasional P3DN. Secara kontinyu pemerintah secara mendorong masyarakat untuk menggunakan produk-produk dalam negeri, dengan salah satu jargon “Aku Cinta Produk Indonesia”. Tentunya hal tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu hal yang ditujukan kepada masyarakat agar dipahami adalah terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Reza Munawir (2021) melalui Sertifikasi TKDN membuktikan sebuah bukti dukungan pemerintah Republik Indonesia yang berusaha untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dikarenakan sertifikasi TKDN dapat berfungsi juga sebagai pembatas jumlah barang yang diimpor dan digunakan dalam sebuah produk yang berada di pasar domestik. Mengutip dari Katadata.co.id, “berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2018, nilai TKDN yang harus dicapai bagi produk mesin dan peralatan pertanian adalah 14,5 hingga 96,3 %” sedangkan untuk bahan bangunan dan mineral non logam minimal 40%.

Presiden Republik Indonesia (2022) Melalui instruksi presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan bukti dorongan terhadap masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Dengan keluarnya inpres tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu peluang untuk pelaku industri untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri mulai dari bahan baku, tenaga kerja dan bahan penolong lainnya yang hal tersebut merupakan unsur-unsur dalam perhitungan nilai TKDN. Bagi perusahaan yang sudah memiliki nilai TKDN lebih dari 40 % untuk industri bahan bangunan akan dijadikan referensi dalam belanja proyek-proyek BUMN dan dan Lembaga pemerintah lainnya yang menggunakan sumber dana dari pemerintah.

Presiden Republik Indonesia (2018) Sebelum lebih lanjut perlu diketahui dari istilah TKDN, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, tercantum pengertian TKDN di dalam Pasal 1, yang berbunyi “TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada Barang, Jasa, serta gabungan Barang dan Jasa”. Dengan kata lain, produk dalam negeri harus memiliki besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang dapat ditunjukkan dengan nilai TKDN melalui sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Sucofindo (2022) Selain dalam pemenuhan peraturan regulasi perusahaan yang sudah melakukan verifikasi TKDN akan memperoleh beberapa manfaat diantaranya: (1) Meningkatkan daya saing perusahaan, TKDN merupakan salah satu komponen yang wajib

disertakan dalam proses lelang di instansi pemerintah, perusahaan Kontraktor Kerja Sama / perusahaan minyak dan gas, sehingga menambah daya saing perusahaan dan meningkatkan peluang untuk memenangkan tender. (2) Meningkatkan peluang pemenang tender yang merujuk pada Perpres 16 Tahun 2018 pasal 66 yang berbunyi “perusahaan yang telah mencapai persentase capaian TKDN melebihi 25% dan memperoleh kontrak > Rp 1 Miliar akan memperoleh insentif dari pemerintah, berupa preferensi dalam menentukan pemenang lelang atau tender“. Preferensi yang diberikan tersebut berupa toleransi atas kelebihan penawaran harga, (3) Membantu pemerintah dalam upaya mengurangi penggunaan barang / jasa impor dan meningkatkan nilai ekonomi dan sosial sehingga menciptakan lapangan kerja di dalam negeri. Untuk Aspek Manufaktur Penghitungan nilai TKDN dilakukan berdasarkan biaya komponen dalam negeri yang dibandingkan dengan harga barang jadi (meliputi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 (satu) satuan produk).

Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: (a) biaya untuk bahan (material) langsung; (b) biaya tenaga kerja langsung; (c) biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan pajak keluaran. Biaya *factory overhead* meliputi biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya Alat Kerja, dan biaya tidak langsung pabrik lainnya yang biayanya tidak dapat dibebankan langsung ke dalam produk tertentu. Komponen dalam negeri untuk masing-masing rincian biaya produksi ditelusuri sampai dengan biaya produksi untuk barang tingkat dua yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri.

Menteri Perindustrian Republik Indonesia (2006) Untuk memperoleh sertifikasi TKDN ini sebuah perusahaan nantinya akan diverifikasi oleh verifikator yang ditunjuk langsung oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian RI yang saat ini adalah PT. Surveyor Indonesia dan PT. Sucofindo Indonesia. Sarat yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikasi TKDN bisa dibilang cukup mudah, yaitu perusahaan hanya cukup menghubungi verifikator yang ditunjuk oleh Pusat P3DN Kementerian Perindustrian RI, lalu perusahaan hanya perlu menyiapkan Akta Pendirian Perusahaan dan Izin Usaha Industri yang masih berlaku. Selain itu perusahaan juga harus menyiapkan bukti-bukti penggunaan produk dalam negeri seperti bahan baku, bahan penolong dan tenaga kerja. Setelah melalui verifikasi oleh tim surveyor maka akan dilanjutkan kesidang panel yang berada di kementerian perindustrian untuk mendapatkan persetujuan dari hasil laporan yang dibuat oleh tim survey. Selanjutnya jika disetujui maka akan diterbitkan sertifikat sebagai perolehan nilai TKDN oleh kementerian perindustrian.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Eddy Yunus (2016) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Strategi mengatakan Peran pemerintah dalam mekanisme penyampaian produk dari produsen ke konsumen sangat besar. Pengaruh keterlibatan pemerintah dalam rangkaian kegiatan produksi melalui kebijakan fiskal dan moneter ternyata berpengaruh efektif dalam dinamika bisnis. Kemampuan otoritas yang dimiliki pemerintah dalam peraturan atau tata niaga berbagai komoditas yang didalamnya termasuk komposisi penggunaan tenaga kerja dan pengendalian supply produk. Melalui berbagai macam kebijakan dan peraturan peran pemerintah sangat penting dalam penciptaan kesempatan dan meminimalkan ancaman terhadap kelangsungan bisnis. Beberapa hal yang dapat dianggap sebagai Peluang bisnis yang muncul dari sektor pemerintah: Pemerintah adalah salah satu pengguna yang cukup besar bagi banyak produk. Pasar pemerintah dapat digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi dinamika di sektor sosial-ekonomi. Meningkatnya anggaran pembangunan yang dialokasikan pemerintah ini menunjukkan semakin banyak kebutuhan produk yang akan diperuntukan bagi masyarakat dalam bentuk prasarana fisik dan bentuk pengeluaran lainnya. Pemerintah dapat berperan sebagai pelindung dari adanya praktik tidak sehat dalam berbagai kegiatan bisnis yang muncul. Disamping itu pemerintah juga berkepentingan dengan tumbuhnya industri dan kegiatan ekonomi domestik.

Arthur A. Thompson (2020) Berkaitan dengan daya saing, Arthur A. Thompson dalam bukunya yang berjudul *Crafting And Executing Strategy* menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan kompetitif perusahaan, seseorang harus dapat mengidentifikasi sumber daya dan kemampuan, langkah selanjutnya dalam menganalisa sumber daya dan kapabilitas dirancang untuk memastikan sumber daya dan kapabilitas perusahaan mana yang lebih unggul secara kompetitif dan sejauh mana mereka dapat mendukung kinerja perusahaan. Selanjutnya mencari keunggulan kompetitif yang berkelanjutan terhadap saingan pasar. Ketika sebuah perusahaan memiliki aset kompetitif yang merupakan pusat strateginya dan lebih unggul dari perusahaan pesaing, mereka dapat mendukung keunggulan kompetitif. Jika keunggulan ini terbukti tahan lama meskipun ada upaya terbaik dari pesaing untuk mengatasinya, maka perusahaan dikatakan memiliki keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Meskipun mungkin sulit untuk sebuah perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, itu adalah strategi penting objektif karena memberikan potensi profitabilitas yang menarik dan berumur panjang.

Untuk mengukur kekuatan kompetitif sumberdaya dapat dilakukan melalui uji kekuatan kompetitif melalui uji VRIN (Value, Rare, Inimitable, Nonsubstitutable) yang berarti berharga Langka, Tidak dapat ditiru dan tidak mudah tergantikan. Dua uji pertama dapat menentukan apakah sumber daya yang dimiliki dapat mendukung persaingan atau daya saing sedangkan dua uji terakhir menentukan apakah keunggulan kompetitif dapat dipertahankan.

Kementrian Perindustrian (2020) Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah besaran nilai persentase keseluruhan komponen produksi yang berasal dari pendapatan domestik, baik itu berupa produk barang, jasa, maupun gabungan dari keduanya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode literatur review. Yaitu mencari referensi yang telah diterbitkan sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang dibahas yaitu : Pengaruh Penerapan Kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Terhadap Daya Saing Produk Lokal. Sedangkan sumber data yang digunakan bersumber dari data sekunder pada halaman web Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) milik Kementerian Perindustrian. Penelitian ini dilakukan pada sektor industri ubin keramik yang berada di bawah naungan keanggotaan ASAKI, dimana industri keramik ini mendapatkan perhatian khusus pemerintah terutama pada proyek-proyek BUMN dan Kementerian PUPR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri keramik di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor yang dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah produksi atau perluasan pabrik. Upaya ini akan memperkuat aliran rantai pasok ubin keramik nasional yang selaras dengan target program substitusi impor sesuai ketetapan pemerintah sebesar 35%.

Sejalan dengan itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Disebutkan bahwa kementerian, lembaga, perangkat daerah diwajibkan menggunakan produk dalam negeri termasuk dalam merancang bangun dan perekeyasa nasional yang mewajibkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 40%.

Berdasarkan catatan Asaki, tingkat utilisasi produksi keramik nasional kembali bertumbuh setelah sebelumnya mengalami "stagnan" pada kisaran pertumbuhan sebesar 60-65% (tahun 2015-2022), hingga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 75% dan meningkat menjadi 82% di semester I tahun 2022.

Total peningkatan kapasitas baru dari tahun 2021-2024 mencapai 89 juta m²/tahun atau setara dengan 109% dari total angka impor keramik di tahun 2021. Dengan adanya kebijakan

TKDN diharapkan sektor industri keramik nasional bisa menjadi tuan rumah yang baik di negeri sendiri dengan kemampuannya untuk mensubstitusi produk impor.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang memiliki besaran 5,01%, sektor industri manufaktur dapat dikatakan lebih unggul karena bertumbuh sebesar 5,47% pada triwulan 1 tahun 2022. Pencapaian industri pengolahan nonmigas tersebut didukung oleh kinerja positif sektor IKFT yang meningkat sebesar 4,71% atau naik 0,14% jika dibandingkan dengan kuartal akhir tahun 2021.

Sejalan dengan pencapaian industri manufaktur skala nasional diatas dan penerapan kebijakan TKDN yang digaungkan pemerintah saat ini, maka pada intern perusahaan pun mulai terlihat adanya peningkatan penjualan produk khususnya pada industri keramik, terlihat di suatu perusahaan keramik dari tahun 2020, 2021 dan 2022 seperti pada table dibawah:

No.	Output	Tahun / September		
		2020	2021	2022
1	Jumlah produksi (m2)	1.180.600	982.584	1.945.000
3	Jumlah Sales Order (m2)	1.236.000	1.380.000	1.444.000

Dari data tabel diatas dapat terlihat adanya peningkatan pada jumlah produksi dan jumlah sales order meskipun tidak signifikan. Hal ini dapat menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari penerapan kebijakan TKDN yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap daya saing perusahaan juga mampu mensubstitusi produk impor.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan kebijakan P3DN yang direalisasikan melalui sertifikasi TKDN mampu mendorong daya saing produk lokal seperti terlihat pada data produksi keramik yang mengalami peningkatan dari tahun 2020 samapi 2022 baik secara total output maupun total penjualan. Hal tersebut seiring dikeluarkannya Peraturan Presiden no.16 tahun 2018.

Saran

Saran untuk pelaku industri agar mendapat nilai TKDN yang lebih besar perusahaan harus melakukan perubahan pada Bill of Material bahan baku dan bahan penolong produksi dengan cara melakukan substitusi material impor dengan material lokal supaya dapat meningkatkan kandungan lokalnya. Jurnal ini diharapkan dapat menjadi referensi mendasar untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh TKDN terhadap kemajuan berbagai industri lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur A. Thompson. (2020). *Crafting And Executing Strategy* (McGraw Hill LLC, Ed.; 23rd ed.). McGraw Hill LLC.
- Eddy Yunus. (2016). *Manajemen Strategi* (Cv Andi offset, Ed.).
- Kementrian Perindustrian. (2020). *Buku pedoman peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN)* (Pusat Peningkatan penggunaan produk dalam negeri Kementrian perindustrian, Ed.).
- Menteri Perindustrian Republik Indonesia. (2006). *Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atas barang/jasa produk dalam negeri* (Patent No. 57M-IDN/PER/7/2006).
- Presiden Republik Indonesia. (2018). *Pemberdayaan Industri* (Patent No. 29).

- Presiden Republik Indonesia. (2022). *Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. (Patent No. 2).
- Reza, M. (2021, October). *Tingkatkan Pemahaman ASN Terkait Kebijakan TKDN*, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Selenggarakan Bimbingan Teknis Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Nilai TKDN. Binakonstruksi.Pu.Go.Id.
- Reza Munawi. (2021, December 28). *Pemerintah Dorong Masyarakat Cintai Produk Dalam Negeri Melalui Sosialisasi Fasilitas Program Sertifikasi TKDN*. [Https://Binakonstruksi.Pu.Go.Id/](https://Binakonstruksi.Pu.Go.Id/).
- Sucofindo. (2022, September 15). *Biar paham! Ini 3 Manfaat Verifikasi TKDN*. [Https://Www.Sucofindo.Co.Id/Id/Read/2022/09/3470/Biar-Paham-Ini-3-Manfaat-Verifikasi-Tkdn](https://Www.Sucofindo.Co.Id/Id/Read/2022/09/3470/Biar-Paham-Ini-3-Manfaat-Verifikasi-Tkdn).